

**ANALISIS TERHADAP ILEGAL MINING DALAM PERSPEKTIF UNDANG
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
LINGKUNGAN ISLAM**

Syaifhurrahman¹, Nurul Listiyani², Rakhmat Nopliardy³

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, 19810141

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, 1104127303

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, 1124116602

Email : Syaifhurrahman@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi hukum terhadap penambang batubara tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang mana penelitian ini membahas mengenai sanksi hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan maraknya pertambangan tanpa izin di Indonesia. Banyaknya pertambangan tanpa izin maka akan membuat lingkungan disekitar menjadi rusak dikarenakan para penambang akan semena-mena dalam melakukan kegiatan pertambangan tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Banyaknya tambang tanpa izin sehingga dapat dirumuskan dalam penelitian ini bagaimana sanksi hukum yang didapat oleh para pelaku berdasarkan undang-undang yang mengaturnya yaitu pada undang-undang nomor 3 tahun 2020 dan bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap para pelaku kegiatan usaha pertambangan tanpa izin ini diterapkan kepada para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Salim HS, (2004), *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Mataram: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, (2015), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto Soerjono, (1983), *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Herdiansyah Haris, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Peter Mamud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Group.

JURNAL

- Purwanto Rahmat Dwi, (2015), Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Penambangan Batubara Ilegal di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Universitas Sriwijaya*.
- Iswadi Amiruddin, (2018), Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Aldrianto Munir, (2020), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Wiup) (Studi Kasus Putusan Nomor 311/PID.SUS/2019/PN.SGM). *Jurnal. Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Raden I, Soleh P, M.Dahlan, Thamrin, (2010), Kajian Dampak Penambangan Batubara terhadap Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan di Kabupaten Kutai Kertanegara. *Laporan Penelitian. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta*
- Aprianto, Dedek; Rika Harini, (2012), Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggarong, Kutai Kertanegara. *Jurnal Bumi Indonesia. Volume 1 Nomor 3 Tahun 2012*

WEBSITE

Hakim I. 2014. Dampak Kebijakan Pertambangan bagi Masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara. <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>. Diakses 4 Mei 2023.

Musthopa Arief. 2008. Memaknai Dunia Pertambangan Nasional.

<http://musthoariponline.blogspot.co.id>. Diakses 4 Mei 2023.

Alwishihab.2014. Ilmu Modern Adaptasi Umat Islam Harus Mendukung Manusia dan Lingkungan.<http://www.alwishihab.com/artikel/2014/9/20/ilmu-modern-adaptasi-umat-islam-harus-mendukung-pembangunan-manusia-dan-lingkungan-oleh-alwishihab>. , tanggal 29 April 2023.

PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab XIV, pasal 33.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945.